

**PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN
(*PERFORMANCE BOND*) DALAM KONTRAK KERJA
KONSTRUKSI PEMERINTAH
(Studi Pada Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-Rasau di Provinsi
Kalimantan Barat)**

TESIS

IIN HIDAYAH NAWIR, S.H.
NIM 2120119006

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum**



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Rembrandt, S.H., M. M.Pd.**
- 2. Dr. M. Hasbi, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2023**

**PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN
(PERFORMANCE BOND) DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
PEMERINTAH (Studi Pada Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-
Rasau di Provinsi Kalimantan Barat)**

Oleh: Iin Hidayah Nawir (2120119006)

ABSTRAK

Undang-undang telah mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat (*unconditional*), namun dalam prakteknya, pencairan jaminan ini kerap menimbulkan permasalahan baru diantara para pihaknya seperti pada pencairan Jaminan Pelaksanaan Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-Rasau di Prov. Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum para pihak dalam Jaminan Pelaksanaan tersebut, Faktor penghambat dalam pencairan Jaminan Pelaksanaan, serta bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan pada Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-Rasau di Prov. Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Hasil Penelitian (1) Kekuatan hukum para pihak pada Jaminan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah didasarkan pada perjanjian yang mereka buat. Adapun kekuatan hukum perjanjian tergantung pada pemenuhan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Untuk kepastian hukum, yang erat kaitannya dengan asas *pacta sunt servanda*, maka perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak mengingkari kewajibannya, maka memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menuntut pelaksanaan prestasi tersebut baik disertai dengan ganti rugi maupun tidak kepada pihak yang mengingkarinya. (2) Hambatan dalam pencairan Jaminan Pelaksanaan Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-Rasau yaitu Kontra Bank Garansi belum dicairkan, adanya gugatan dari Penyedia Jasa, Penyedia Jasa Pailit, Posisi Pengguna Jasa sebagai Kreditur dalam kepailitan Penyedia Jasa; dan Adanya larangan pencairan Jaminan dari kurator. (3) Bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-Rasau ada 2 (dua) yaitu: *Pertama*, perlindungan hukum preventif yakni mewajibkan jaminan diterbitkan oleh Penjamin yang direkomendasikan OJK dengan mencantumkan klausul tanpa syarat (*unconditional*), mudah dicairkan, pelepasan hak-hak istimewa Penjamin, melakukan konfirmasi keabsahan jaminan ke Penjamin, dan penguatan pengawasan serta perlindungan konsumen oleh OJK. *Kedua*, perlindungan hukum represif yaitu melalui Non-Litigasi dengan memanfaatkan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan melalui LAPS SJK; serta melalui Litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Kata Kunci : *Klaim Jaminan, Jaminan Pelaksanaan, Kontrak Kerja Konstruksi*

**SOLUTION FOR DISBURSEMENT OF PERFORMANCE BOND IN
GOVERNMENT CONSTRUCTION CONTRACTS
(A Study on the Construction Package of Sekayam/Entikong-Rasau Road in
West Kalimantan Province)**

By: Iin Hidayah Nawir (2120119006)

ABSTRACT

The law has regulated that the disbursement of Performance Bond in Government Construction Contracts is easy to be disbursed and unconditional. However, in practice, the disbursement of this bond often leads to new issues among the parties involved, as in the disbursement of the Performance Bond for the construction package of Sekayam/Entikong-Rasau Road in West Kalimantan Province. This research aims to analyze the legal strength of the parties involved in the Performance Bond, the inhibiting factors in the disbursement of the Performance Bond, and the legal protection for service users in resolving the disbursement of the Performance Bond for the construction package of Sekayam/Entikong-Rasau Road in West Kalimantan Province. This research is an empirical juridical study. Data collection techniques include literature review and field research. The collected data is analyzed qualitatively and presented descriptively. Conclusions are drawn based on the analysis conducted. Research Findings: (1). The legal strength of the parties involved in the Performance Bond of Government Construction Contracts is based on the agreement they made. The legal strength of the agreement depends on the fulfillment of the valid requirements of an agreement as stated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. For legal certainty, which is closely related to the principle of *pacta sunt servanda*, a valid agreement is binding and enforceable as law for the parties involved, giving rise to rights and obligations. If one party fails to fulfill its obligations, it grants the opposing party the right to demand the performance of the obligation, with or without compensation, from the party that failed to fulfill its obligations. (2). The obstacles in the disbursement of the Performance Bond for the construction package of Sekayam/Entikong-Rasau Road include: the Performance Bond Counter Guarantee has not been disbursed, claims filed by the Service Provider, bankruptcy of the Service Provider, the position of the service user as a creditor in the bankruptcy of the Service Provider, and the prohibition of disbursement by the curator. (3). The legal protection for service users in the resolution of the disbursement of the Performance Bond for the construction package of Sekayam/Entikong-Rasau Road consists of two forms: first, preventive legal protection requires the guarantee to be issued by a Guarantor recommended by the Financial Services Authority (OJK), including clauses of being unconditional, easily liquidated, waiving special rights of the Guarantor, verifying the validity of the bond with the Guarantor, and strengthening supervision and consumer protection by OJK. Second, repressive legal protection is achieved through non-litigation by utilizing Alternative Dispute Resolution and through the LAPS SJK, as well as through litigation by filing a breach of contract lawsuit with the Pontianak District Court.

Keywords: Disbursement Claim, Performance Bond, Construction Contracts